

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan roda pemerintahan banyak dibentuk lembaga atau institusi. Lembaga pemerintah merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara. Tujuan dibentuk adanya lembaga pemerintah adalah untuk menjalankan aktivitas layanan terhadap masyarakat. Tersedianya layanan dan kemampuan dalam peningkatan layanan pada saat ini dan masa yang akan datang menjadi tujuan utama dari lembaga pemerintah yang bersifat organisasi nirlaba, lembaga pemerintah mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut di masa yang akan datang. Tujuan yang ingin dicapai biasanya ditentukan dalam bentuk kualitatif, misalnya peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan dan keamanan.

Sehubungan dengan banyaknya perubahan dibidang ekonomi, sosial dan politik dalam era reformasi ini, berdampak pada pencatatan perubahan perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan tuntutan masyarakat akan adanya transparansi pelaksanaan kebijakan pemerintah, demokratisasi dalam pengambilan keputusan, pemberian pelayanan oleh pemerintah yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Sebagai konsekuensinya maka

pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sejak Januari tahun 2001 yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih besar. Dengan tingkat kemandirian keuangan yang lebih besar berarti daerah tidak akan lagi sangat tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan propinsi melalui dana perimbangan. Namun tidak berarti jika kemandirian keuangan daerah tinggi, maka daerah sudah tidak perlu lagi mendapatkan dana perimbangan. Dana perimbangan masih tetap diperlukan untuk mempercepat pembangunan di daerah.

Halim (2001 : 167) menjelaskan bawa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan seminimal mungkin, agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Beberapa permasalahan keuangan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen antara lain : (1) ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, yaitu subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran daerah (2) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah dan kurangnya efektivitas kinerja keuangan.

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan perbandingan skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat juga digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Adanya otonomi daerah tersebut mengakibatkan terjadinya desentralisasi sistem pemerintahan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, karena itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Analisis laporan keuangan sebagai alat ukur kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen adalah salah satu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan atau

kegiatan Dinas kesehatan Kabupaten Kebumen dalam kurun waktu tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “ *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen Periode 2013-2015.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian latar belakang masalah di atas, maka peneliti membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen pada tahun 2013-2015 berdasarkan analisis rasio keuangan : rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan berdasarkan analisis : rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD ?

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen periode 2013-2015.
2. Pengukuran Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dilihat dari hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Keserasian dan Rasio Pertumbuhan.

3. Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dilihat dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD.
4. Pasal 20 Ayat 2 PP Nomor 105 Tahun 2000 untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah
5. Menurut (Mahmudi, 2016 : 169) ada beberapa Rasio yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan : Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, Rasio Efektivitas Pajak, Rasio Efisiensi Pajak, Rasio Derajat Kontribusi BUMN, Rasio Keserasian.
6. Pengukuran Keserasian Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan menggunakan Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.
7. Pengukuran Pertumbuhan PAD, Pendapatan, Belanja Operasi dan Belanja Modal Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen
8. Pengukuran rata-rata pertumbuhan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dengan menggunakan pertumbuhan PAD, Pendapatan, Belanja Operasi, dan Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini :

1. Bagi Peneliti

Untuk mengembangkan akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen

2. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen)

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang terkait dengan kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk mengkaji lebih lanjut kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selama periode 2013-2015 berdasarkan analisis rasio keuangan : rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio keserasian, dan rasio pertumbuhan.

2. Untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen selama periode 2013-2015 berdasarkan rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD.

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yaitu :

BAB 1 :LATAR BELAKANG

Dalam bab ini di uraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

BAB 2 :TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang landasan teori, pengertian standar akuntansi pemerintah, pengertian laporan keuangan, pengertian laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian analisis laporan keuangan, pengertian analisis laporan keuangan pemerintah daerah, pengertian kinerja keuangan pemerintah daerah, pengertian analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian dahulu, kerangka berfikir, dan paradigma penelitian.

BAB 3 :METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang populasi dan sampel penelitian, metoda pengambilan data, variabel penelitian, dan metode analisis data.

BAB 4 :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang analisis data dengan menggunakan alat analisis rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio keserasian, rasio pertumbuhan, rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi PAD serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 :KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data dari pembahasan masalah serta saran-saran kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sama diharapkan untuk lebih mendalam mengenai kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan lebih banyak rasio.